

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, Andi, 2017 ,judul *Hukum Pidana Indonesia* penerbit Sinar Grafika.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan UNCAC*, P.T Refika Aditama , Bandung.

Utrecht, 1965, Judul *Hukum Pidana 2* Penerbit Pustaka Tinta Mas

Mulyadi, Lilik, 1996, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap, Yahyan, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuady,2013 *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana.

Waluyo, Bambang 2016, *pemberantasan tindak pidana korupsi (Strategi dan Optimalisasi)* cetakan ke 2, sinar Grafika, Jakarta,

—————, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada

Widyo, Pramono, R, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya : Sebuah Perspektif jasa dan Guru Besar*, Kompas Media, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945

TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor. 21 tahun 2008 tentang penyelenggara penanggulangan Bencana

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi

Keputusan preseden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak Pidana korupsi

Surat Edaran No. 003/A/JA/02/2015 Tentang Sikap Kejaksaan Tentang Hukuman Mati

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B607/E/11/1993 Pembuatan Surat Dakwaan.

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP Tahun 2019 Versi September).

Putusan dan Surat Dakwaan

Putusan Pengadilan Nomor perkara 57/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.bdg

Putusan Pengadilan Nomor perkara 55/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.bdg

Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : 57/TUT.01.04/08/2021 dengan Terdakwa
m totoh gunawan

Karya Ilmiah

Hanafi, Evie, 2013, *kajian penerapan hukuman mati terhadap tersangka korupsi dana bantuan bencana alam berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*, Recidive Vol 2 No 2

Maharani, Alifia Swastika, *Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jurist-diction, Vol 3 Tahun 2020

M. Toule, Elsa R, 2013, *eksistensi ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3.

Oksidekfay, Yanto, 2017, *penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (death penalty to corruptors in a certain condition)*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol 14 No.01.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/76/pdf>

Romli Atmasasmita dalam Indriyanto Seno Adji, 2001, *Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Jurnal Keadilan,

R. Julio Prasetyo, jurist-Diction, 2019 *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Akhir Telaah Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia, sebagaimana dikutip dalam jurnal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Vol. 2 No. 3

Siregar, Bisma, 2015, *ham, hukuman mati, dan pandangan bimsar siregar*, binus law, januari

Waluyo, Bambang, 2014, *optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 2

Sumber lain

<https://mudanesia.pikiran-rakyat.com/highlight/pr-1342938005/putusan-M.TOTOH-GUNAWAN-gunawan-pemberi-gratifikasi-korupsi-aa-umbara-dibacakan-kamis-4-november-2021> Di akses tanggal 28 November 2021 pukul 20.10 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104180531-12-716763/bupati-bandung-barat-nonaktif-aa-umbara-divonis-5-tahun-bui>. Di akses pada 28 November 2021 Pukul 21.05 WIB

Wawancara

Wawancara dengan Supardi, Direktur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus pada tanggal 11 November 2021

Wawancara dengan Andhi dan Devi Lisnawati, kepala biro hukum dan Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Desember 2021

Wawancara dengan ig Eko Purwanto, Hakim Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri khusus Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2021

Wawancara dengan Sumedi Anggono Mulyo, Kepala Biro tata ruang dan bencana alam, pada tanggal 8 November 2021